

**KONSEP PENETAPAN HARGA HASIL PERIKANAN DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM( Studi Kasus Pelelangan  
Ikan Paotere di Kota Makassar)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana

Ekonomi Islam (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Oleh

**ST. MARFUAH SIDDIK**

**NIM. 10200112081**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ST. MARFUAH SIDDIK  
NIM : 10200112081  
Tempat/Tgl.Lahir : Sungguminasa, 09 Januari 1995  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Jl. Sirajuddin Rani No.31C  
Judul : Konsep Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruh, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM  
ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Makassar, November 2016  
Penyusun,  
ST. MARFUAH SIDDIK  
NIM : 10200112081

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Konsep Keadilan Penetapan Harga Jual Beli Hasil Perikanan Dalam Prespektif Islam (Studi kasus Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar)”**, yang disusun oleh St. Marfuah Siddik, NIM: 10200112081, mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2016 M, bertepatan dengan 9 Rabi’ul-Awwal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Desember 2016 M  
14 Rabi’ul-Awwal 1438 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Syaharuddin., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Muslimin., M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Hasbiullah., SE, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rahmawati Muin., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Drs. Urbanus Uma Leu., M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Islam  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag  
NIP : 19581022 198703 1 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara St. Marfuah Siddik, NIM: 10200112081, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, “ **Konsep Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar)**“, memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, November 2016

Pembimbing I



Dr. Rahmawati Muin, M.Ag  
NIP. 19760701 200212 2 001

Pembimbing II



Drs. Urbanus Uma leu, M.Ag  
NIP. 19581231 199203 1 017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr...Wb..

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkatnya Rahmat-Nya penulis dapat mengerjakan skripsi ini yang berjudul “Konsep Keadilan Penetapan Harga Jual Beli Hasil Perikanan Dalam Prespektif Islam ( Studi Kasus Pelelangan Ikan Paotere Kota Makassar)”.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak terutama Ayah **H. Marjuanda Siddik, SE** dan Ibu **Hj. Nur Asia, S.Ag** selaku orang tua tercinta, yang sungguh penulis tak mampu membalas setiap pengorbanannya selama ini, yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, pada kesempatan yang baik ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof Dr.Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr.Rahmawati Muin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.

4. Bapak Drs. Thamrin Logawali.,MH selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr. Rahmawati Muin, M.Ag., selaku Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag., selaku Pembimbing kedua yang dapat meluangkan segenap waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sampai skripsi ini selesai dengan baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, selama penulis melakukan studi.
8. Para Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah membantu kelancaran proses administrasi
9. Para Pimpinan Kantor Kelurahan Gusung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada para Nelayan, Ponggawa, Paccato, yang berada di pelelangan ikan Paotere yang telah membantu melakukan wawancara dari penulis. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Allah Swt
10. Seluruh keluarga besar penulis terutama kakak-kakak dan adik saya, dan juga kepada keluarga kecil RM.Murah, yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya buat penulis.

11. Teman-Teman dan sahabat-sahabat angkatan 2012, terkhusus jurusan Ekonomi Islam 3,4. Hamsinar, Maziah, Marni, Nismawati, Munawwarah, Nurul Fain Al-Fina, Jamaluddin, Wahyuddin, Asnawi, Hadi. serta alumni Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar yang memberikan banyak motivasi, Sahabat baik saya, Sri Sukmawati, Reztika Putri R, Mudrika Rizkillah, Musdalifa N, Muh. Arif, Zulkifli, Ahmad, Nur Rahmat Arif, Andi Fadly yang telah sabar menunggu kabar sarjana dari saya, dan Iqbal Wahid yang selalu menyelengi pengerjaan skripsiku dengan KFC dan hiburan lainnya, Serta sahabat lainnya yang tak dapat penulis sebutkan, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik, siap membantu jika dalam kesulitan, menemani suka dan duka, memberikan semangat dan dukungan.
12. Teman-teman KKN Reguler angkatan ke 51 Se-Kec. Pattallassang terutama kepada posko Pacellekang .
13. Semua keluarga penulis, teman-teman, dan berbagai pihak yang namanya tidak dapat dituliskan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang dimiliki. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Samata Gowa , November 2016

ST. MARFUAH SIDDIK

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1-12</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	 <b>13-36</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Harga .....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	24
D. Tinajaun Umum Tentang Nelayan .....	32
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	 <b>37-40</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Sumber Data .....	38
D. Jenis Pengumpulan Data.....	39
E. Instrument penelitian .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
G. Pengujian Keabsahan Data .....	40
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	 <b>41-58</b>
A. Gambaran Umum Pelelanganiakan Paotere.....	41
B. Mekanisme Sistem Penetapan Harga Hasil Perikanan Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar.....	46



C. Analisis Penetapan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Islam.....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59-60</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>61</b>



## ABSTRAK

**NAMA : St. Marfuah Siddik**  
**NIM : 10200112081**  
**JUDUL : Konsep Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar).**

---

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya penetapan harga yang di tentukan oleh sepihak yang berakibat kepada perekonomian nelayan, pokok masalah tersebut selanjutnya dikaji kedalam beberapa submasalah yaitu : 1) Bagaimana mekanisme sistem penetapan harga pada penjualan hasil perikanan yang terjadi di pelelangan ikan paotere di Kota Makassar?, 2) Apakah penetapan sistem harga yang diterapkan sesuai dengan syariat Islam?.

Jenis penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosoilogis dan yuridis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah nelayan, juragan, dan pengumpul ikan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik pengumpulan pengelolaan dan analisi data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga yang terjadi di pelelangan ikan Paoter di Kota Makassar belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena meskipun awalnya terjadi kerja sama antara dua belah pihak yaitu ponggawa sebagai pemeberi modal dan nelayan sebagai pengelola tetapi dalam hal penetapan harga hanya satu pihak saja yang boleh menentukannya yaitu pihak Ponggawa saja.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran bagi para Ponggawa dalam menetapkan harga yang sepihak dan sekiranya pemerintah dapat memperhatikan sistem pentapan harga hasil perikanan agar tidak ada pihak yang merasa dizalimi.

**Kata Kunci : *Sistem penetapan harga, penetapan harga sesuai syariat Islam.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak diantara dua benua Asia dan Australia sehingga wajar kalau terdapat banyak aktifitas kehidupan penduduknya berada di sekitar pantai sebagai nelayan.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau daerah. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara atau daerah semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara atau daerah tersebut.<sup>2</sup>

Sementara itu pendapatan nelayan adalah hasil yang diterima oleh seluruh rumah tangga nelayan setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan pada waktu tertentu. Hasil tangkapan mereka belum bisa dikatakan pendapatran sebelum terjadi transaksi jual beli antara nelayan dengan pembeli di mana nelayan sebagai produsen dan pembeli sebagai konsumen.

Masyarakat nelayan merupakan golongan yang termaksud miskin karena pada umumnya tingkat perekonomiannya masih lemah karena kondisi struktur tenaga kerja, nelayan disana hanya bisa bermodalkan tenaga kerja, peralatan tangkap ikan

---

<sup>1</sup> Mulyadi. *Ekonomi Kelautan* (Jakarta: Raja Grafindo, Pwwersada, 2007). h.10 .

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/pendapatan\\_per\\_kapita](http://id.wikipedia.org/wiki/pendapatan_per_kapita) (Senin, 25 Juli, 2016).

yang sederhana, sumberdaya ikan yang musiman,<sup>3</sup> tingkat pendidikan yang rendah dan minim pengetahuan informasi pasar.

Rendahnya tingkat pendidikan nelayan cenderung menghambat proses alih teknologi dan keterampilan yang berdampak pada kemampuan mereka sehingga sulit keluar dari lingkaran permasalahan yang dihadapinya, selain itu tingkat pendapatan yang tinggi hanya pada musim tertentu saja.

Islam memberikan inovasi dalam setiap ruang kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spriritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sentuhan transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.<sup>4</sup>

Jual beli adalah solusi yang diberikan oleh Allah untuk memiliki harta. Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu demi tercapainya kebutuhan yang mereka inginkan. Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau dengan bentuk pertukaran yang lainnya,

---

<sup>3</sup> M. Ghufuran H. Kordin. *Ironi Pembangunan* (Yogyakarta: 2007). h.123-125.

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.5.

baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah mu'amalah.

Oleh karena itu, hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara masyarakat dalam satu jalan yang adil. Islam memberikan jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/ 4: 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>5</sup>

Dalam ayat dijelaskan bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka dan berdasarkan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama.<sup>6</sup> Selain itu jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h.122.

<sup>6</sup> T.M Hasby Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000), h. 45.

legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian), sehingga tidak menimbulkan madharat atau kerugian bagi kedua belah pihak, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nya jual beli. Apabila tidak terpenuhi salah satu diantara rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Dan apabila tetap dilakukan, tentu akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.

Islam juga melarang sikap ketidak jujur an, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktifitasnya selalu dalam bingkai Syari'at, sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha dan terjalin kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam.<sup>7</sup> Menggunakan dan mempraktekkannya sesuai syari'at, sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Setiap transaksi jual beli yang memberikan peluang terjadinya persengketaan, karenan barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak, atau salah satu pihak menipu pihak lain hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.

---

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.5.



Fuqaha Hanafiyah membedakan obyek jual beli mejadi dua yaitu *Mabi'* yakni barang yang dijual dan *tsaman* atau harga. Kedua obyek ini tidak akan pernah terputus satu sama lainnya karena dalam akad jual beli yang tidak disertai penyebutan *tsaman* adalah Fasid, sedang jika tidak disertai penyebutan *Mabi'* adalah batal.

Jumhur fuqaha mensyaratkan agar orang yang melakukan akad memiliki kebebasan kehendak dalam menjual belikan barangnya. Apabila dia dipaksa agar menjual barangnya tanpa alasan yang hak maka jual beli tersebut tidak sah. Apabila sebaliknya jika seseorang dipaksa untuk menjual barangnya dengan alasan yang hak maka jual beli itu sah. Misalnya seseorang yang dipaksa agar menjual rumahnya untuk perluasan jalan, masjid, atau makam, atau dipaksa agar menjual barangnya untuk membayar utang atau untuk menafkahi istri atau kedua orang tuanya. Dalam kondisi seperti ini dan sejenisnya, jual beli sah demi menempatkan ridha dari syariat diatas ridhanya.<sup>8</sup>

Bidang perikanan merupakan harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan yang mengembangkan sistem ketahuan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dalam memperhatikan peningkatan produksi pendapatan nelayan.

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta Pusat: PT Pena Pundi Aksara, 2009), h. 57-58.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki areal perikanan yang cukup potensial baik perikanan darat dan perikanan laut serta didukung tersedianya sumber daya manusia yang relatif besar. Salah satu daerah di propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi pengembangan perikanan laut yang cukup besar adalah pelelangan ikan Paoter Kecamatan Ujung Tanah Makassar.

Pelelangan ikan Paotere Makassar merupakan salah satu pusat pendaratan ikan yang cukup penting dalam peningkatan kegiatan produksi di daerah Sulawesi Selatan, karena didukung oleh berbagai macam fasilitas yang berfungsi dengan baik serta dapat dijangkau oleh kapal-kapal Ikan adalah sebagai berikut.

1. Tempat berlabuhnya kapal/perahu ikan
2. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
3. Tempat pengembangan masyarakat nelayan
4. Tempat memuat perbekalan bagi nelayan
5. Tempat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, dan
6. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pusat pengumpulan data (PPI)

Paotere.

Minimnya pendapatan para nelayan yang berada di Pangkatan Pendaratan Ikan Paotere adalah aspek struktural di mana pada saat ini lemahnya posisi nelayan dalam pemasaran, yaitu nelayan tidak memiliki akses terhadap pasar. Kelemahan posisi tersebut menyebabkan margin keuntungan pemasaran lebih banyak jatuh ke pedagang dan bukan ke nelayan ataupun pembudidaya ikan. Kendati dalam waktu-waktu tertentu nelayan-nelayan buruh/kecil atau tradisional mendapat tangkapan

yang banyak, keadaan ini tidak menjadikan mereka memiliki nilai tukar (uang) yang memadai. Masalahnya adalah, jaringan pemasaran ikan dikuasai sepenuhnya oleh para pedagang perantara. Hubungan antara nelayan dan pedagang perantara sangat kuat dan berjangka panjang.

Nelayan membangun kerjasama dengan nelayan perantara untuk mengatasi kesulitan modal ataupun untuk konsumsi sehari-hari. Bahkan tidak tertutup kemungkinan berlaku sistem rante di mana pedagang antara menyediakan pinjaman modal dengan sistem bunga. Akhirnya, nelayan yang berjuang mati-matian mencari ikan di laut lepas, tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hubungan nelayan tradisional dengan pedagang perantara menimbulkan ketergantungan dan pada akhirnya menciptakan hubungan keterikatan yang mengakar kuat bertahun-tahun. Akibatnya, posisi tawar nelayan menjadi lemah.

Nelayan tidak memiliki posisi bagian yang kuat untuk sekedar menetapkan harga jual hasil tangkapannya sendiri. Hal ini menyebabkan pendapatan nelayanpun cenderung lebih rendah dari yang seharusnya diperoleh.

Permasalahan dan kendala lain yang masih banyak mempengaruhi kegiatan usaha perikanan di pelepasan ikan Paotere adalah menyangkut pengetahuan dan keterampilan nelayan yang masih kurang mengetahui tentang strategi, sehingga tidak mengetahui harga yang sedang bersaing di pasara internasional untuk komoditas yang di tangkap. Serta masalah yang terakhir adalah terbatasnya permodalan.dalam rangka mengatasi hal tersebut diperlukn pola kemitraan untuk membantu nelayan baik dar segi strategis pemasaran maupun dalam pengetahuan akses penjualan.

Oleh karena itu proses pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat harus dilakukan secara terpadu dan bersama-sama. Sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Nilai keseimbangan menolak tegas setiap perilaku manusia yang rakus dan serta menjadikan penguasa materi sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan ekonomi. Berdasarkan pemaparan diatas , penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “KONSEP PENETAPAN HARGA HASIL PERIKANAN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus Pelelangan Ikan Paotere Kota Makassar).

## **B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Rencana Penelitian ini berjudul “Konsep penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar)”. oleh karena itu maka penelitian ini difokuskan pada keadilan harga yang ditetapkan oleh nelayan dan juragan ikan yang ada di pelelangan ikan paotere kota Makassar. untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini serta menghindari adanya ketidakpahaman, maka penulis memberikan pengertian terhadap kata-kata yang di anggap penting dalam judul tersebut sebagai berikut:

- a. Pengertian keadilan adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya yang selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang berbeda.
- b. Pengertian harga jual-beli Bagi Ibnu Khaldun adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. sehingga harga dapat di artikan sebagai nilai tukar yang di tetapkan oleh penjual dan pembeli untuk mendapatkan suatu produk.

## 2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut di atas, dapat di deskripsikan berdasarkan permasalahan dan pendekatan peneliti ini, bahwa sistem penetapan harga pada penjualan hasil perikanan antara nelayan dan juragan ikan dengan menerapkan prespektif Islam merupakan suatu upaya konkrit yang dilakukan untuk mewujudkan penetapan harga yang adil sehingga terciptanya kesejahteraan terhadap nelayan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sistem penetapan harga pada penjualan hasil perikanan antara nelayan dan juragan yang terjadi di Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar?
2. Apakah penetapan sistem keadilan harga yang ditetapkan sesuai dengan syariat Islam?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang di maksud dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan masalah pokok yang di bahas dengan teori yang ada dalam buku dan hanya mengacu pada konsep penetapan harga jual-beli hasil perikanan di Pelelangan Ikan Paotere kota Makassar. Maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terlebih dahulu yang memiliki kemiripan dengan judul yang diambil peneliti. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

1. Annisa Yustiarani (2008) “Kajian Pendapatan Nelayan dari Usaha Penangkapan Ikan dan Bagian Retribusi Pelelangan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke”. Dalam penelitian ini, Tempat pelelangan ikan mempunyai nilai strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Produksi hasil tangkapan nelayan tergantung pada faktor cuaca, musim dan jumlah kapal yang membongkar hasil tangkapannya. Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang ada, mengatur, mengurus, dan mengawasi pelelangan ikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan nelayan; mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak. bagi nelayan maupun konsumen; memberdayakan koperasi nelayan; meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan nelayan.<sup>9</sup>
2. Alimuddin (2009) “Merangkai Konsep Harga Jual-Beli Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam”. Dalam penelitian ini, Konsep harga jual-beli berbasis nilai keadilan di dalam Islam berdasarkan metode *bayani* adalah *cost-plus profane basic needs*, yaitu suatu penetapan harga jual berdasarkan seluruh biaya yang terjadi untuk menghasilkan produk dan biaya untuk memasarkan hasil produk serta biaya oprasional lainnya ditambah kebutuhan hidup profane yang layak bagi pengusaha dan keluarganya, sedangkan berdasarkan metode *burhani* adalah *cost-plus basic needs*, yaitu *cost-plus profane basic needs* ditambah kebutuhan akhirat yang meliputi Zakat, haji, dan sunnah yaitu, umrah, dan qurban. Adapun konsep harga jual berbasis nilai keadilan di dalam

---

<sup>9</sup> Annisa Yustiarani (2008) “Kajian Pendapatan Nelayan dari Usaha Penangkapan Ikan dan Bagian Retribusi Pelelangan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke”



Islam berdasarkan metode *irfani* adalah *cost-plus basic needs and environment*, yaitu *cost-plus basic needs* ditambah biaya untuk pelestarian lingkungan dan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat disekitarnya dan generasi mendatang.<sup>10</sup>

3. Windi Dwihastuti (20015) “Startegi Bauran Pemasaran Pada Pedagang Sayur-Mayur di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini strategi nauran pemasaran dalam prespektif ekonomi Islam merupakan suatu upaya konkrit yang di lakukan untuk memengaru strategi pemasaran Islam terhadap produk para pedagang untuk mewujudkan pedagang yang memiliki sikap dan perilaku yang terpuji.<sup>11</sup>

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem penetapan harga yang adil dalam penjualan hasil perikanan nelayan.
- b. Untuk mengetahui apakah sistem harga yang di tetapkan sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>10</sup> Alimuddin (2009)“Merangkai Konsep Harga Jual-Beli Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam”

<sup>11</sup> Windi Dwihastuti (2015) “Startegi Bauran Pemasaran Pada Pedagang Sayur-Mayur di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

### a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya masalah yang berkaitan dengan keadilan penetapan harga jual-beli hasil perikanan
- 2) hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang.

### b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan informasi yang konstruktif guna di jadikan bahan masukan bagi kepala pekelangan ikan paoter kota Makassar umumnya dan kepada para nelayan dan juragan ikan pada khususnya yang berkaitan dengan keadilan penetapan harga jual-beli hasil perikanan yang Islami.
- 2) Diharapkan kepada para nelayan dan juragan untuk dapat mengaplikasikan bagaimana menetapkan harga jual-beli hasil perikanan yang adil dan yang diterapkan oleh Nabi Muahammad saw.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Tinjauan Umum Tentang Keadilan*

##### 1. Pengertian Keadilan

Kata adil *al-'adl* (keadilan) merupakan salah satu tindakan yang banyak disebut –sebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Kata *al-'adl* dalam pandangan ahli usul fiqh berpandangan bahwa kata tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Keadilan memang menempati posisi sebagai nilai yang tertinggi, tetapi dalam penjabarannya tetap menggunakan kata *al-'adl*, sekalipun berada dalam tataran praktis.<sup>12</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *al-'adl* mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda.<sup>13</sup> Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya yang selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang berbeda. Seorang yang menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

Para ulama mendefenisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya”, hal ini mengantarkan kepada kondisi “persamaan” artinya dalam konteks kalitas dan proporsional, pengertian adil adalah memberikan hak melalui

---

<sup>12</sup>Hamsir, *Teori dan Prospek Sistem Mudharabah Pada Perbankan Syariah* (Makassar: Alauddin Press), h. 86-87.

<sup>13</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan,2004), h. 324.

jalan terdekat, yaitu memberikan hak kepada orang tanpa menunda-nunda, karena penundaan utang seorang padahal ia mampu adalah penganiayaan.

## 2. Konsep Keadilan Sebagai Implementasi

Keadilan diturunkan dari agama yang menempatkan kehendak Allah SWT, Adil sebagai implementasi tidak menzalimi dan tidak dizalimi lazim digunakan dalam fikih muamalah berupa:<sup>14</sup>

- a. Tidak ada *mafsadah* (kerusakan); dalam makna ekonomi *no externalities* terhadap lingkungan;
- b. Tidak terdapat di dalamnya garar, dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*, garar dalam pengertian ada kezaliman terhadap pelaku ekonomi lainnya.
- c. Tidak ada *maisir*. Dalam istilah ekonomi disebut *Uncertainty with zero sum game un utility exchange*. Maisir diartikan sebagai bentuk garar yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*).
- d. Tidak ada riba; dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*. Riba adalah bentuk garar yang timbul akibat pertukaran kewajiban (*liability*).

## B. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Harga.

### 1. Pengertian Harga

Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan

<sup>14</sup> Majid Kadduri, *The Islamic Conception of justice* (Baltimore and London: The Jhon Hopkins University Press, 1984), h. 39.

diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh organisasi perusahaan.

Harga juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat buran pemasaran. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga adalah satu dari empat buran pemasaran.

Harga merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar yaitu harga yang adil. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun dan harga-harga naik.

Ibnu Taimiyah juga membahas masalah harga secara spesifik, yang dimana sering menggunakan dua terma tentang harga yaitu: *`iwad al-misl* (*equivalen compensation* atau kompensasi yang setara) dan *saman al-misl* (*equivalen price* atau harga yang setara). *Saman al-misl* adalah suatu konsep diman harga yang ditetapkan berdasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi. *Saman misl* adalah harga yang wajar dan tingkat laba yang tidak berlebihan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Riyadh: al-Riyad Press, 1963), h.520-521.



Dalam pertukaran atau pengukur nilai suatu produk dalam pasar biasanya menggunakan uang. Jumlah uang tersebut biasanya menunjukkan suatu produk atau jika seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang dan jasa tersebut. Sehingga harga dapat diartikan sebagai nilai pertukaran yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk.<sup>16</sup>

Harga juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran.

Unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Place* dan *Promotion*). Kalau harga merupakan pendapatan/pemasukan bagi pengusaha/pedagang, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut.<sup>17</sup>

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu as-şaman dan as-si'r. As-şaman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si'r adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi

---

<sup>16</sup> Indara NS, *pengertian harga*, [one.indoskripsi.com/click/2499/0](http://one.indoskripsi.com/click/2499/0), (Sabtu, 6 Februari, 2016).

<sup>17</sup> Kotler. *Manajemen Pemasaran jilid 2*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 139.

as-si'r menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan at-tas'ir al-jabbari.<sup>18</sup>

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang.

Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulasi dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan

---

<sup>18</sup>[http://organisasi.org/definisi\\_pengertian\\_harga\\_tujuan\\_metode\\_pendekatan\\_Penetapan\\_harga\\_manajemen\\_pemasaran](http://organisasi.org/definisi_pengertian_harga_tujuan_metode_pendekatan_Penetapan_harga_manajemen_pemasaran), (Sabtu, 6 Februari 2016).

memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum Harga

Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi dan muamalah adalah halal. Kecuali yang melarang. Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah yakni firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat/ 2 : 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-baqarah).<sup>20</sup>

Allah yang telah memberikan hak tiap orang dengan membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan: Nabi SAW. Bersabda Yang artinya : "saya mendengar Abu Sa'id al-Khudriy berkata: Rasulullah Saw berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka".<sup>21</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa

<sup>19</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), h. 90.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002) , h. 13

<sup>21</sup> Ibnu abdullah Muhammad binYazid al quruwaini, *Sunan Ibnu Majjah* Juz I, h. 687.

bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, “juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar”.<sup>22</sup>

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qu’ran. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW Dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas’ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemasalahatan).<sup>23</sup>

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*iwād al-miṣl*). Menurut Ibnu Taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya penawaran berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan Penawaran.

Menurut Al-Gazali menyatakan motif berdagang adalah mencari untung. Gazali juga mengatakan bahwa hendaknya motivasi keuntungan itu hanya untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa

---

<sup>22</sup> Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khttab (Terjemahan)*, (Jakarta: Khalifah,2006), h. 612.

<sup>23</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: GemaInsani,2003), h. 94.

keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.

Dengan demikian, Islam tidak pernah memberi batasan tentang penentuan harga, hal ini terbukti dengan adanya hadis Rasulullah yang enggan menentukan harga. Sementara itu, apabila terjadi penentuan harga secara tidak langsung membatasi kebebasan seseorang (penjual) untuk menjual barang tersebut.

### **3. Pematokan Harga**

Pematokan harga adalah yang dimaksudkan adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar, agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok demi kemaslahatan umum.<sup>24</sup>

Islam tidak mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua jenis barang. Tanpa membedakan antara barang makanan pokok, dengan bukan makanan pokok. Sebab,

---

<sup>24</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terjemah (Surabaya: Risalah Hati, 1996), h. 212.

hadis-hadis tersebut melarang pematokan harga secara mutlak, sehingga maknanya umum.

Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik bahwa pernah di Madina terjadi kenaikan harga-harga barang, kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah Saw agar menetapkan harga namun beliau menolaknya karena harga barang di pasar ditentukan oleh Allah.<sup>25</sup>

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنْ بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه أبو داود، ابنو مجه و ترميز)

Artinya:

“ Dari Anas bin Malik Rasulullah Saw berkata : Sesungguhnya Allahlah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang aha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta. \ HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Hadis tersebut dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan pematokan harga barang di pasaran, karena dianggap perbuatan zalim atas kebebasan penggunaan harta. Membatasi harga berarti meniadakan kebebasan tersebut. Pematokan harga tersebut membahayakan, bahkan termasuk sangat membahayakan umat dalam keadaan perang maupun damai. Pematokan harga tersebut membahayakan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan juga dapat menyebabkan krisis ekonomi.

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 156.



Kebijakan menentukan harga di pasaran dapat menghilangkan barang dari pasaran, sehingga harga-harga menjadi naik dan melahirkan kesulitan bagi orang fakir miskin yang akhirnya tidak mampu membeli barang. Dan pada sisi lain, akan memperkaya orang-orang yang sudah kaya dengan jalan menjual barang di pasaran gelap dengan harga yang sangat mahal.<sup>26</sup>

Didalam Islam pemaksaan atas penjual untuk menjual barang kepada orang lain tanpa kehendaknya, Sebagaimana firman Allah Swt QS As-Saf Ayat 10-11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠) تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui”.<sup>27</sup>

Telah diterangkan dalam hadis Abdullah bin Samad bahwa para sahabat r.a. hendak menanyakan kepada Rasulullah saw. Tentang amal perbuatan yang paling disukai Allah Swt sehingga mereka dapat melakukannya. Kemudian Allah menurunkan surah ini, yang diantara kandungannya bila kalian melaksanakan semua perintah-Nya, maka Dia mengampunimu, memasukkan kamu ke dalam surga, dan derajat yang tinggi.<sup>28</sup>

Perniagaan di dunia hanya memberikan keuntungan yang sifatnya sementara, berjihad atau berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri, itulah perniagaan yang sesungguhnya. Berberjuang di jalan Allah banyak caranya, tidak harus bertempur di

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 156.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.275

<sup>28</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, (Depok:Gema Insani,2000). h.691.

medan perang, tidak harus menjadi seorang kiai, akan tetapi berjuang dengan cara berniaga secara transparansi atau kejujuran dan tidak merebut hak-hak orang lain juga termasuk berjihad di jalan Allah yang mana kita melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala hal-hal yang sangat dibenci-Nya.

Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang. Fakta pematokan harga tersebut memang membahayakan, sebab pematokan harga tersebut akan membuka pasar gelap, dimana orang-orang akan melakukan jual beli di sana dengan penjualan di bawah tangan, yang tidak diketahui oleh negara, bahkan jauh dari pengawasan negara. Inilah yang dinamakan pasar gelap. Sehingga harga membumbung tinggi, lalu barang hanya dikuasai oleh orang kaya sementara yang miskin tidak. Juga pematokan harga tersebut menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan menyebabkan krisis ekonomi. Di samping itu, orang-orang akan terbelenggu oleh kekayaan mereka, sebab mestinya makan kepemilikan mereka terhadap harta tersebut adalah mereka berhak untuk menguasainya, sementara dengan adanya pematokan harga, maka telah terjadi pembelengguan pada diri mereka. Dan itu tidak diperbolehkan selain dengan nash syara', sementara itu tidak terdapat satu nash syara' pun. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengekang orang dengan membuat patokan harga tertentu untuk barang mereka malah mereka harus dilarang untuk menaikkan dan menurunkan harga.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. h.213.

## C. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli

### 1. Pengertian Jual-Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* ( البيع ) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'I* ( البيع ) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>30</sup>

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>31</sup> Menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya “Kode Etik Dagang Menurut Islam” menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “Menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>32</sup>

Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

<sup>31</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 147.

<sup>32</sup> H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 18.

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan.

Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara', benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat

---

<sup>33</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), h. 327.

dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual-Beli

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al- Qur'an, Hadits dan Ijma' diantaranya adalah sebagai berikut QS. Al-Baqarah/ 2 : 275 yang berbunyi :

### a. Landasan Al-Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dari ayat tersebut, telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

### b. Landasan Hadits

Yang artinya : “Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi

---

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 69.

Muhammad Saw pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al- Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).<sup>35</sup>

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan.

#### c. Landasan Ijma’

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam.<sup>36</sup>

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

---

<sup>35</sup> Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salam juz III*, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960), h. 15.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h.127.

### 3. Syarat dan Rukun Jual-Beli

Di dalam Islam telah ditetapkan syarat dan rukun jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi syarat dan rukun tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”, sedangkan rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.<sup>37</sup> Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah :

#### a. Syarat-Syarat Sah Jual Beli

##### 1) Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan aqad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan aqad (transaksi) antara lain :<sup>38</sup>

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas
- c. Suka sama. Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* itu di tangan walinya.
- d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam

---

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1114.

<sup>38</sup> Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.

sekali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

## 2) Uang/harga dan barang (*ma'qud 'alaih*)

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud 'alaih* yaitu :<sup>39</sup>

### a. Suci Barangnya

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah dimasak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama malikiyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.

Menurut madzhab Hanafi dan Zahiri, semua barang yang mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 114.

<sup>40</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 130.



b. Dapat diambil manfaatnya

Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing, ular dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.<sup>41</sup>

c. Milik orang yang melakukan akad

Menjualbelikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah.<sup>42</sup> Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

d. Dapat diserahterimakan

Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.<sup>43</sup>

e. Dapat diketahui

Barang yang sedang dijual-belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak

<sup>41</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 50.

<sup>42</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996),h.30.

<sup>43</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, (Bandung : CV. Pustaka Setia), h.36.

diketahui jumlahnya. Untuk barang *zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majlis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya.

### 3) Ijab dan qabul (sighat/aqad)

Sighat atau ijab-qabul artinya ikatan berupa kata-kata penjual dan pembeli. Umpamanya: “Saya jual padamu ...” atau “Saya serahkan ini ... untuk kamu miliki”. Kemudian si pembeli mengucapkan, “Saya terima” atau “ya, saya beli”.<sup>44</sup> Dalam Fiqih al-Sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan qabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta menqabul si pembeli atau sebaliknya, dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang menqabul adalah si penjual.<sup>45</sup>

### **b. Rukun Jual Beli**

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli itu ada tiga macam :

1. Penjual dan pembeli (aqidain)
2. Uang /harga dan barang (ma'qud 'alaih)

---

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 103.

<sup>45</sup> Sayid Sabiq, h. 112.

### 3. Ijab dan qabul (sighot/aqad)<sup>46</sup>

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (aqidain), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Nelayan**

### **1. Definisi Nelayan**

Masyarakat merupakan komunitas yang mendiami wilayah tertentu. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan serta memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat untuk mencapai tujuan dalam hidupnya.

Menurut Hassan Sadly, masyarakat dipahami sebagai suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.<sup>47</sup> Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang di dalamnya terdapat norma-norma yang harus dijaga dan dijalankan.

Nelayan dapat diartikan sebagai orang yang hasil mata pencaharian utamanya berasal dari menangkap ikan di laut. Nelayan di dalam Ensiklopedi Indonesia

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70.

<sup>47</sup> Hasan Sadly, *Sosiologi untu masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1980), h.

dinyatakan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.<sup>48</sup>

Nelayan merupakan suatu pekerjaan menangkap ikan di laut yang dilakukan oleh seseorang. Kebanyakan orang yang bekerja sebagai nelayan adalah masyarakat yang tinggal di desa pesisir.

Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, mulai dari pancing, jala dan jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu atau jukung yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan. Namun dalam perkembangannya nelayan dapat pula dikategorikan sebagai seorang yang profesinya menangkap ikan dengan alat yang lebih modern berupa kapal ikan beserta peralatan tangkapnya yang sekarang dikenal sebagai anak buah kapal (ABK). Disamping itu juga nelayan dapat diartikan sebagai petani ikan yang melakukan budidaya ikan di tambak dan keramba-keramba di pantai.

Nelayan merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja mencari ikan di laut yang menggantungkan hidup terhadap hasil laut yang tidak menentu dalam setiap harinya. Masyarakat nelayan cenderung mempunyai sifat keras dan terbuka terhadap perubahan. Sebagian besar masyarakat nelayan adalah masyarakat yang mempunyai kesejahteraan rendah dan tidak menentu. Kesulitan mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari membuat masyarakat nelayan harus rela terlilit hutang dan menanggung hidup yang berat, mereka tidak hanya berhutang kepada kerabat dekat, tetapi mereka juga berhutang kepada tetangga dan teman mereka.

---

<sup>48</sup> *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru , 1983), h. 133.

Menurut *Raymond Firth*, karakteristik yang menandai kehidupan nelayan miskin adalah:

- a. Pendapatan nelayan bersifat harian dan tak menentu dalam setiap harinya
- b. Rendahnya tingkat pendidikan para nelayan serta anak-anak dari keluarga nelayan yang menyebabkan para nelayan tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan lain
- c. Sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan menimbulkan ketergantungan yang besar bagi nelayan kepada pedagang atau pengepul hasil tangkapan (produk).
- d. Besarnya jumlah modal yang dikeluarkan dibidang usaha perikanan, menyebabkan para nelayan lebih memilih bergerak di bidang perikanan kecil-kecilan.
- e. keluarga nelayan miskin umumnya sangat rentan dan mudah terjerumus dalam perangkap utang yang merugikan.<sup>49</sup>

Masyarakat nelayan umumnya masyarakat yang memiliki etos kerja tinggi dan mempunyai sifat kekerabatan yang erat diantara mereka. Masyarakat nelayan umumnya masyarakat yang kurang berpendidikan.<sup>50</sup> Pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan kasar yang banyak mengandalkan otot dan pengalaman, sehingga untuk bekerja sebagai nelayan latar belakang pendidikan memang tidak penting.

Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, ternyata bukan hanya masyarakat yang sudah berumur lanjut, tetapi banyak masyarakat generasi muda yang masih

---

<sup>49</sup> Bagong Suyanto & Karnaji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan tak berpihak kepada rakyat miskin*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 60.

<sup>50</sup> Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: Intrans Publishing, 2013), h. 63.

berumur 17-25 tahun juga sudah bekerja sebagai nelayan.<sup>51</sup>Umunya mereka adalah anak dari keluarga nelayan yang ikut bekerja sebagai nelayan yang terkadang masih duduk dibangku sekolah.

## **2. Kehidupan Keluarga Nelayan Kecil**

Nelayan kecil merupakan nelayan tradisional yang mencari ikan di laut dengan menggunakan perahu kecil dan alat tangkap yang sederhana dan tidak banyak tersentuh oleh teknologi canggih. Wilayah perairan yang dapat diakses oleh nelayan kecil pun tidak sejauh nelayan modern yang menggunakan banyak teknologi canggih, nelayan kecil hanya mampu menjangkau perairan di pinggir-pinggir pantai saja, berbeda dengan nelayan modern yang dapat menjangkau perairan laut sampai jauh di tengah-tengah laut. Berbeda dengan nelayan modern yang acap kali mampu merespon perubahan dan lebih kenyal dalam menyiasati kondisi *over fishing*, nelayan tradisional seringkali justru mengalami proses marginalisasi dan menjadi korban dari pembangunan dan modernisasi perikanan.

Dengan menggunakan alat tangkap yang sedikit dan teknologi yang sederhana, nelayan kecil hanya mampu memperoleh hasil tangkapan ikan dalam jumlah yang sedikit pula yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu pun saat cuaca dan kondisi laut yang sedang bersahabat. Saat cuaca dan kondisi laut yang tidak bersahabat, para nelayan kecil tidak dapat mencari ikan di laut dan hal itu mengakibatkan nelayan kecil tidak dapat memperoleh penghasilan sehingga keluarga nelayan kecil tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka,

---

<sup>51</sup> Bagong Suyanto & Karnaji, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya* h. 70.

keadaan tersebut yang menjadikan keluarga nelayan kecil hidup dalam keterbatasan ekonomi dan jauh dari kesejahteraan.

Berbeda dengan keluarga nelayan modern atau juragan kapal yang rata-rata hidup berkecukupan, keluarga nelayan kecil sering kali hidup dengan kondisi serba pas-pasan. Keluarga nelayan kecil dituntut untuk bertahan hidup dalam himpitan ekonomi yang melanda keluarga mereka, disaat harga kebutuhan pokok yang setiap tahunnya naik, mau tidak mau mereka harus tetap bisa membelinya demi kelangsungan hidup anggota keluarga mereka, belum juga biaya pendidikan untuk anak mereka yang harus mereka tanggung.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### ***A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati. pendekatan di arahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara holistik (utuh).<sup>45</sup>

Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian yang di lakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan menentukan presepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang di bahas dan untuk menentukan arah penelitian. kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari responden.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka peneliti berlokasi di Pelelangan Ikan Paotere jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti mengambil obyek penelitian pelelangan di kota Makassar karena melihat bahwa tempat pelelangan ikan paotere bisa dikatakan pusat pelelangan ikan di kota makassar.

---

<sup>45</sup> Lrexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.3.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi Islam yang memuat tentang pembahasan mengenai jual beli dalam Islam dan pendekatan psikologis yaitu pendekatan dengan masalah yang akan diteliti., dan peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit social, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

### ***C. Sumber Data***

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian diantaranya yaitu Nelayan, Juragan pemilik kapal dan Pengumpul Ikan.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi yang terkait dengan kajian yakni data yang berasal dari buku-buku, kitab, al- qur'an maupun hadits, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan . Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>46</sup> Observasi metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan keadilan penetapan harga yang di tetapkan terhadap hasil perikanan di pelelangan ikan paotere kota Makassar.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang memberikan keterangan.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini menggunakan wawancara yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi keadilan penetapan harga hasil jual-beli perikanan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Hasil

---

<sup>46</sup> Burhan Bugin, *penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Kencana, 2009),h.15.

<sup>47</sup> Husain Usman dan purno setiady akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet.IV : Jakarta: PT.Bumi Aksara,2001), h. 73.

penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan instrumen penelitian seperti, pedoman wawancara, pedoman observasi, maupun checklist untuk wawancara yang akan dilakukan, dan alat perekam.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, serta penekannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir dan argumentatif.

#### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Pengujian keabsahan dalam metode penelitian kualitatif menggunakan validitas internal pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal, dan realibilitas pada aspek konsistensi, serta obyektivitas pada aspek naturalis. Adapun pada penelitian ini, tingkat keabsahan ditekankan pada data yang akan diperoleh pada lapangan tempat meneliti.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Pelelangan Ikan Paotere***

##### **1. Wilayah Pelelangan Ikan Paotere**

Pelelangan ikan Paotere merupakan salah satu pangkalan pendaratan ikan di kota Makassar di samping TPI Rajawali. Pelelangan ikan Paotere termasuk dalam Wilayah Kecamatan, Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan tipe pelabuhan D dalam klasifikasi pelabuhan perikanan secara Geografis terletak pada posisi  $119^{\circ} 24' 30''$  BT dan  $5^{\circ} 6' 19''$  LS.

Pembangunan sarana perikanan adalah merupakan salah satu peningkatan produksi dan efisiensi usaha yang mana bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan nelayan. Usaha peningkatan produksi ini perlu ditunjang oleh pembangunan sarana prasarana perikanan dengan cara membangun pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan yang dapat memberikan kemudahan bagi nelayan dalam kegiatan produksi pengolahan serta pemasaran.

Pelelangan ikan Paotere Makassar merupakan salah satu pusat pendaratan ikan di Daerah Sulawesi Selatan dengan fasilitas – fasilitas yang berfungsi dengan baik dan dapat dijangkau oleh kapal-kapal ikan dari berbagai tempat. Peranan pangkalan pendaratan ikan yang cukup penting dalam peningkatan kegiatan masyarakat nelayan dan peningkatan kegiatan produksi.

Paotere adalah pusat pendaratan ikan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab langsung dengan Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Makassar UPTD.

PPI Paotere yang berfungsi sebagai tempat berlabuhnya atau bertambatnya perahu/kapal perikanan untuk mendaratkan hasil tangkapannya, serta memuat perbekalan kapal dan awak kapal perikanan serta sebagai basis kegiatan produksi, pemasaran dan pengolahan hasil laut serta tempat pembinaan masyarakat nelayan.

Pelelangan ikan Paotere terletak di Jalan Sabutung no. 1 Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, berbatasan dengan

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Makassar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Patingalloang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tamalabba (Komp. TNI AU)
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Cambayya

Pada tahun 2008, pemerintah pusat melalui Departemen Kelautan dan Perikanan mengeluarkan program Pengembangan Sistem Rantai Dingin ( *Cool Chain System* ) di berbagai daerah di Indonesia. Khusus Propinsi Sulawesi Selatan, Pelelangan ikan Paotere Kota Makassar mendapat kesempatan sebagai tempat pelaksanaan program pengembangan system rantai dingin dan merupakan sarana percontohan sistem rantai dingin (CCS) di Propinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan adanya usaha pengembangan Sistem Rantai Dingin dalam wilayah Kota Makassar adalah :

1. Untuk menekan tingkat kemunduran mutu ikan selama proses distribusi berlangsung
2. Meningkatkan mutu produk perikanan dan penyediaan bahan pangan protein hewani yang bergizi dalam rangka peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia
3. Meningkatkan mutu dan jaminan keamanan bahan pangan asal ikan dalam rangka perlindungan konsumen
4. Meningkatkan mutu dan nilai tambah yang memiliki daya saing di pasar global
5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan
6. Meningkatkan ekspor/devisa negara
7. Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa/ menggunakan alat penangkap yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Negara RI, dapat dipidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

a. Aturan yang tertulis :

Pemerintah Kota Makassar Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 05 “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa/ menggunakan alat penangkap yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Negara RI, dapat dipidanapenjara paling

lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)”.

b. Aturan berupa himbauan

1. Siapa yang duluan menawar ikan dengan harga tertinggi maka dia yang akan mendapatkan ikan hasil tangkapan tersebut
2. Pedagang tidak boleh menggunakan bahan kimia
3. Nelayan tidak boleh menggunakan bom ketika melakukan aktivitas melaut atau menangkap ikan
4. Tidak boleh menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan
5. Tidak melakukan penangkapan ikan di Zona terlarang (daerah konservasi) di area yang menjadi tempat perlindungan biota laut
6. Tidak melakukan ilegal *fishing*, bagaimana memperlakukan ikan sesuai dengan sistem rantai dingin untuk mempertahankan mutu hasil ikan hasil tangkapan

Nelayan harus mengikuti dan tunduk dengan aturan yang diberlakukan karena dengan adanya aturan tersebut semua dapat terorganisir dan berjalan dengan baik, karena TPI Paotere adalah pusat konsentrasi penjualan ikan dan sebagai Kontrol (Kepala PPI, Staf dan yang terkait).

2. Tujuan, Sasaran dan Fungsi Pelelangan Ikan Paotere

Tujuan di buatnya profil UPTD PPI paotere sebagai alat penyajian seluruh perkembangan kegiatan pelaksanaan UPTD PPI paotere.



Sasaran Terwujudnya pelaksanaan kegiatan operasional pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang terarah sesuai dengan pemanfaatannya sebagai salah satu sarana yang sangat menunjang usaha nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolahan ikan dalam memasarkan produksinya. Adapun fungsi Pelelangan ikan Paotere:

- a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan
  - b. Tempat berlabuhnya kapal/perahu perikanan
  - c. Tempat mendaratkan ikan hasil tangkapan
  - d. Tempat memuat perbekalan bagi nelayan
  - e. Tempat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
  - f. Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
3. Kondisi Sarana Pelelangan Ikan Paotere

Di Kota Makassar sudah ada dua PPI yang beroperasi yaitu pelelangan Paotere dan pelelangan Paotere Rajawali, Pangkalan Paotere terletak di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan secara Geografis terletak pada posisi 119o 24o 30o BT dan 5o 6o 19o LS.

Selanjutnya komponen pembangunan bagian atas kondisi fisik pada umumnya masih baik dan dimanfaatkan nelayan sesuai fungsinya namun ada beberapa bagian mengalami kerusakan tetapi masih dimanfaatkan nelayan dan tidak mempengaruhi aktifitas kegiatan nelayan yang ada.

Nelayan yang memanfaatkan Pelelangan Paotere sebahagian besar merupakan nelayan lokal (75%) dan sebahagian lagi nelayan pendatang (25%) dari luar Kota Makassar antara lain dari Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Takalar dan

Bulukumba Jumlah armada/kapal perikanan,alat tangkap,bakul dan pengelola yang tercatat setiap harinya melakukan kegiatan pendaratan di dermaga anantara 17 sampai 122 buah, degan volume pendaratan setiap bulannya 1.110-3,648 ton, nelayan perikanan antara 800 sampai 1100 orang dengan armada periakanan perbulan terdiri dari kapal motor seperti < 5 GT (Jolloro) 1.099 unit, > 5 GT 396 unit, 30 GT 4.090 unit, Perahu motor temple (katinting) 60 unit dan perahu tanpa motor 50 unit.

***B. Mekanisme Sistem Penetapan Harga Hasil Perikanan antara Juragan dan Nelayan di Pelelangan Ikan Paotere Kota Makassar.***

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Dalam situasi normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Tetapi, sering sekali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor mendistorsinya.

Seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor yang mendistorsinya. Untuk itu, pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga.

Sistem transaksi hasil tangkapan nelayan di Pelelangan Ikan Paotere pada umumnya dilakukan dengan mekanisme transaksi yang hampir sama dengan wilayah pesisir yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan mekanisme transaksi yang berlaku

secara umum bahwa nelayan yang memiliki kesepakatan/ikatan dengan *pongawa* maka hasil tangkapannya dipasarkan kepada *pongawa* tersebut, sedangkan bagi yang tidak memiliki hubungan bebas memasarkan hasil tangkapannya ke beberapa pedagang pengumpul maupun pedagang pendatang yang biasa ditemui di tengah laut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salah satu nelayan yang bernama Dg. Bella 52 Tahun yang mengatakan bahwa:

“Kita ini sekedar nelayan yang pergi mencari ikan di lautan, tidak ada wewenang menjual di lelong, apa lagi menjual di *Paccato* karena yang menjual itu cuma *Ponggawa* karena modal setiap kali berlaut berasal dari *pongawa* dan nilainya juga tidak sedikit, tetapi *Ponggawa* juga terbuka masalah harga penjualan kepada nelayan-nelayannya”.<sup>52</sup>

Hal yang sama yang juga di rasakan oleh Dg. Nyompa 54 Tahun selaku nahkoda kapal sekaligus nelayan juga mengatakan bahwa :

“Nelayan boleh dikata hanya berkontribusi dalam hal tenaga saja, nanti setelah kapal bersandar kita tinggal menunggu hasil penjualan dari *Ponggawa*”.<sup>53</sup>

Hal yang sama juga di rasakan oleh Dg. Nganyu 44 tahun selaku nelayan yang berada di kapal bahwa :

“Harga ikan yang mau di jual di tentukan oleh *Ponggawa*, kemudian ada tawar-menawar sampai cocok harga dengan *Paccato* yang mau beli ikan”.<sup>54</sup>

Wawancara selanjutnya oleh Ismail 35 tahun selaku juragan atau biasa di sebut *Ponggawa* mengatakan bahwa :

“Hasil tangkapan di jual ke Pengumpul atau *Paccato* di pelelangan, kalau harganya cocok maka ikan di angkut ke pelelangan, hasil tangkapan juga

---

<sup>52</sup> Dg. Bella, wawancara. (16 Oktober 2016).

<sup>53</sup> Dg. Nyompa, wawancara. (16 oktober 2016).

<sup>54</sup> Dg. Nganyu, wawancara. (16 oktober 2016).

biasanya di jual di pengecer tapi lebih sering di *Paccato* karena prosesnya penjualannya cepat di banding ke pengecer”<sup>55</sup>

Hal yang sama juga di katakan oleh *pongawa* lainnya yang berada di pelelangan Paotere Dg.Nyala 55 tahun bahwa:

“*Ponggawa* yang menentukan harga jual ikan dalam satu basket atau satu gabus, harga satu basket untuk jenis biasa Rp.300.000,- untuk ikan yang biasa masuk restoran Rp.350.000,- sampai Rp.400.000,- / basketnya”.<sup>56</sup>

Hal yang sama juga di katakan oleh *Ponggawa* lainnya H.Sultan 55 tahun bahwa:

“Sebenarnya tidak ada standar untuk harga ikan-ikan yang ada di pelelangan, karena itu semua tergantung faktor situasi dan kondisi pada saat itu, biasanya banyak ikan di pelelangan tapi harganya juga biasa mahal, dan begitu juga sebaliknya, ikan sedikit di pelelangan tetapi harganya murah”.<sup>57</sup>



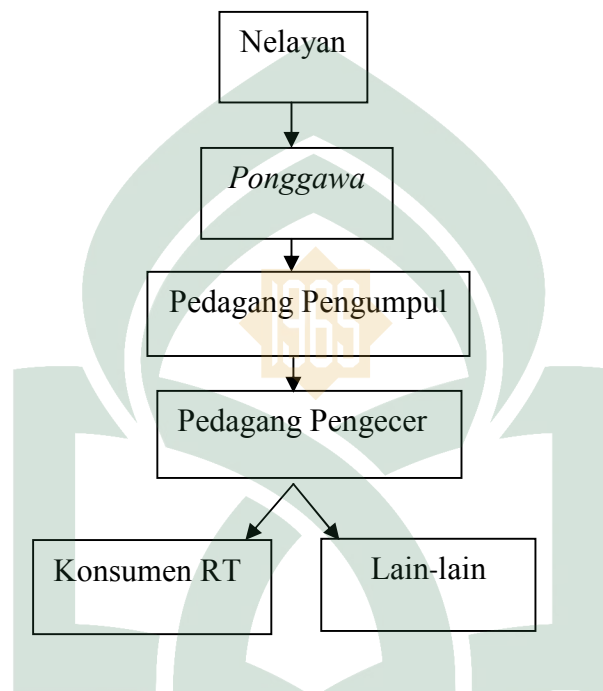
<sup>55</sup> Ismail, wawancara. ( 16 oktober 2016).

<sup>56</sup> Dg.Nyala, wawancara. ( 16 oktober 2016).

<sup>57</sup> H.Sultan, wawancara. (16 oktober 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut mekanisme penetapan harga di pelelangan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Transaksi Penjualan**



Proses transaksi dilakukan di atas kapal mulai dari sandarnya kapal nelayan, kemudian ikan hasil tangkapan di setor kepada *pongawa* yang selanjutnya dijual kepada pedagang pengumpul atau *paccato*’ atau mitra lainnya, dengan kisaran harga Rp 300.000,-/ basket untuk jenis ikan yang biasa kita temukan, dan Rp 400.000,-/ basket untuk jenis ikan kakap, baronang dan lain-lain. kemudian ikan tersebut ditawarkan lagi oleh pedagang pengecer untuk dijual, dalam hal ini *paccato*’ menaikkan harga ikan yang di beli dari *pongawa*.

Penentuan harga yang sepenuhnya di kendalikan oleh *pongawa* mengakibatkan nelayan tidak leluasa dalam menentukan harga hasil tangkapannya. Padahal yang kita ketahui bahwa harga merupakan suatu nilai tukar dari produk

barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dimana harga merupakan salah satu penentu keberhasilan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa.

Strategi penetapan harga pada intinya adalah berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap satuan produk, ditambah dengan keuntungan atau laba yang dikehendaki. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh organisasi perusahaan.

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar.

Al Quran sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempegunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW. Menyatakan sifatnya riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan.

Secara lebih rinci adapun pembagian hasil penjualan ikan antara nelayan dan juragan adalah:

Modal setiap perjalanan : Rp 10.500.000,- x 2 = Rp 21.000.000,-

Hasil tangkapan setiap perjalanan :  $\pm 1$  ton (1000 kg) = 60 basket

Perkiraan setiap bulannya :  $\pm 2 \text{ ton (1000kg)} = 120 \text{ basket}$

Penghasilan kotor :  $2000 \text{ kg (120 basket)} \times 300.000$   
 $= \text{Rp } 36.000.00,-$

Laba yang diperoleh : Hasil – Modal  
 $\text{Rp } 36.000.000,- - \text{Rp } 21.000.00,-$   
 $= \text{Rp } 15.000.000,-$

Perhitungan bagi hasil :

Bagian untuk juragan dan nahkoda kapal adalah 10% (untuk juragan selaku pemilik modal 7% dan untuk nahkoda kapal 3%)  $\times 2$  dalam sebulan .

Bagian untuk pemilik juragan :  $\text{Rp } 15.000.000,- - 14\% = \text{Rp } 2.100.000,-$

Bagian untuk nahkoda kapal :  $\text{Rp } 15.000.000,- - 6\% = \text{Rp } 900.000,- +$   
 $\text{Rp. } 3.000.000,-$

Jadi sisa untuk nelayan :  $\text{Rp } 15.000.000,- - \text{Rp } 3.000.000,-$   
 $= \text{Rp. } 12.000.000,-$

Anak buah kapal yang ada di kapal berjumlah 4 orang. Jadi bagian masing-masing nelayan adalah  $= \text{Rp. } 12.000.000,- : 4 \text{ orang} = \text{Rp } 3.000.000,-/\text{bulan}$

Inilah perkiraan penghasilan per bulan yang diterima oleh mereka yang kegiatannya menangkap ikan di laut atau yang profesinya sebagai nelayan. Hasil tersebut merupakan hasil tangkapan bersifat positif, dan jika hasil tangkapan berbanding terbalik yang sifatnya negatif atau setara dengan hasil tangkapan nelayan tidak mencapai modal maka akan dihitung sebagai utang dan yang akan menanggungnya adalah para nelayan yang akan dilunasi pada saat penangkapan ikan berikutnya.

Melihat proses bagi hasil antara nelayan dan juragan belum dapat di katakan sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi karena pada dasarnya keadilan diturunkan dari agama yang menempatkan Allah SWT, adil sebagai implementasi dan tidak menzalimi dan dizalimi, tidak ada mafsadah (kerusakan), tidak terdapat di dalamnya garar, maisir, dan tidak terdapat riba. Akan tetapi sangat berbeda dengan fakta yang ada di lapangan dimana penentuan keuntungan yang 10% sudah di tentukan sepihak oleh ponggawa sendiri dan jika hasil tangkapan nelayan tidak menutupi modal maka akan terhitung sebagai utang yang di bebaskan kembali ke nelayan-nelayan.

Dari hal tersebut sudah terlihat bahwa nelayan menjadi pihak yang terzalimi mulai dari penetapan harga hasil perikanan yang telah diatur dan dikendalikan dengan jalur dan tahapan distribusi yang berlaku. Dimana penetapan harga jual ikan laut oleh nelayan kepada *ponggawa* ditentukan secara sepihak oleh *ponggawa* ikan, dan nelayan tidak berdaya menentukan harga jual ikan laut hasil tangkapannya dan penentuan keuntungan 10% yang bersifat mutlak dan yang terakhir nelayan akan berutang jika hasil tangkapannya tidak menutupi modal.

Selanjutnya hasil perikanan ke pedagang pengumpul, dimana Peneliti juga sempat mewawancarai Asraf 56 tahun *Paccato* di pelelangan mengatakan bahwa:

“Ikan yang di beli dari *ponggawa* kembali di jual ke pedagang pengecer dengan menaikkan harga Rp.50.000,- sampai Rp.70.000,-/ basketnya”.<sup>58</sup>

*Paccato* lain Yusli 40 tahun juga mengatakan bahwa :

“Harga yang dinaikkan untuk pedagang pengecer sebenarnya tergantung dari kondisi di pelelangan, biasanya peccato menjual murah ikan ke pengecer

---

<sup>58</sup>Asraf, wawancara. (22 oktober 2016).



karena beberapa faktor, banyaknya ikan, atau ikan mulai kurang segar dan sebagainya.”<sup>59</sup>

Hal yang sama juga di katakan oleh Ramis 35 tahun anggota dari *Paccato* bahwa:

“Semakin terik matahari, maka semakin murah juga ikan yang ditawarkan ke pengecer, yang jelas modal yang di gunakan bisa kembali”.<sup>60</sup>

Pernyataan ini secara implisit menyatakan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh permintaan saja, tetapi juga tergantung pada penawaran terhadap barang tersebut. Bahkan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya, prinsipnya tidak bisa diketahui.

Murah bukan karena melimpahnya ikan , demikian juga mahal bukan karena kelangkaan ikan di pelelangan. Kadang-kadang ikan berlimpah tapi mahal dan kadang-kadang ikan di pelelangan sangat sedikit, tetapi harganya murah.

Jika kita mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Islam, jual beli dalam prinsip Islam mengharuskan adanya kejelasan baik pada pelaku transaksi maupun barang transaksinya. Dalam Islam tidak dibenarkan jika ada ketidakjelasan dalam proses transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak atau lebih.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya:

“Jangan kamu membeli ikan yang masih dalam air (yaitu sungai, laut dan seumpamanya) karena ia ada unsur *gharar*”.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Yusli, wawancara. (26 oktober 2016).

<sup>60</sup> Ramis, wawancara. ( 26 oktober 2016).

Perlu diketahui kita dilarang melakukan transaksi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian, makanya sangat diperlukan kejujuran dan keadilan dalam praktek jual beli.

Pada saat penelitian penulis juga sempat mewawancarai Drs. Baso Kadir selaku Kepala Kelurahan Gusung mengenai penetapan harga bahwa:

”Pemerintah tidak turut campur dalam permasalahan harga yang dimulai dari Nelayan, *Ponggawa*, *Paccato*, dan pedagang pengecer. Pemerintah dalam hal ini Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan menyerahkan sepenuhnya permasalahan harga kepada mekanisme pasar”.<sup>62</sup>

Dari hasil analisa di atas dapat di bahas bahwa harga pada tingkat konsumen tidak dilindungi oleh pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Makassar dan juga pemerintah propinsi tidak turut campur dalam penetapan harga yang ada di pelelangan ikan paotere kota makassar, karena harga terbentuk pada saat transaksi tawar-menawar di pelelangan antara *pongawa*, *paccato*, pengecer, hingga ke konsumen rumah tangga dan lain-lain.

### ***C. Analisis Penetapan Harga dalam Prespektif Ekonomi Islam***

Dasar dari pengembangan ekonomi mikro tidak akan pernah lepas dari permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang menjadi dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang lebih luas.

---

<sup>61</sup>al-Baybaqi, *al-Sunan al-Kubrii*, hadis no 1564, jil. 5, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1994, h. 340.

<sup>62</sup>Kepala Kelurahan Gusung, wawancara. (26 oktober 2016).

Rasulullah Saw tidak mau menentukan harga secara sepihak ketika diminta oleh para sahabat untuk menentukan harga, karena Rasulullah Saw tidak mau menzalimi salah satu pihak. Apabila Rasulullah Saw menentukan harga secara sepihak ketika diminta oleh para sahabat maka otomatis Rasulullah Saw telah menzalimi salah satu pihak, dan perbuatan menzalimi salah satu pihak ini akan di tuntutan di hadapan Allah Swt di hari kiamat. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad Saw menolak untuk menentukan harga secara sepihak ketika diminta oleh para sahabat.

Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik.<sup>63</sup>

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنْ بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه أبو داود، ابنو مجه و ترميد)

Artinya:

“Dari Anas bin Malin Rasulullah Saw berkata : Sesungguhnya Allahlah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah dan dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 156.

penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>64</sup>

Rekayasa harga dapat terjadi apabila ada seseorang yang menjadi penghubung antara pedagang, kemudian ia membeli dagangan tersebut sebelum masuk pasar. Sehingga para pedagang belum tahu harga di pasar yang sebenarnya. Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang.

Penetapan harga ini berupa perintah agar para pedagang di pasar tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang demi kemaslahatan. Nabi Muhammad Saw bersabda bahwasanya Allah lah yang menentukan harga, menentukan harga menjadi rendah atau tinggi sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melawan kehendaknya. Oleh karena itu penetapan harga tidak bolehkan.

Faktanya transaksi yang terjadi di pelelangan ikan Paotere penetapan harga hasil perikanan pada tahap pertama, *pongawa* dalam hal ini pemberi modal memberikan modalnya berupa kapal, bahan bakar, beras, es balok, dan bekal selama perjalanan yang dinominalkan sebesar Rp 20.000.000 per 10 harinya.

Pada tahap kedua, Nelayan mengelolah modal yang telah diberikan oleh *pongawa* tersebut, dalam hal ini nelayan melakukan perjalanan laut untuk menangkap ikan. Perjalanan yang di tempuh setiap kali melakukan penangkapan

---

<sup>64</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: Pt RajaGrafindo persada, 2013), h.167-168.

bisa memakan waktu 10-14 hari atau dikondisikan dengan persediaan es balok dan setiap bulannya nelayan hanya berlayar 2 kali.

Pada tahap ketiga, setelah kapal bersandar, kemudian hasil tangkapan di setor ke *Ponggawa*, dimana *pongawa* yang menentukan harga hasil tangkapan nelayan yang selanjutnya penetapan harga jual ditentukan secara sepihak oleh *pongawa* ikan, dan nelayan tidak berdaya menentukan harga jual ikan laut hasil tangkapannya. Selanjutnya dijual kepada pedagang pengumpul atau *paccato* atau mitra lainnya, kemudian ikan tersebut ditawarkan lagi oleh pedagang pengecer untuk dijual, dalam hal ini *paccato* menaikkan harga ikan yang dibeli dari *pongawa*.

Pada tahap terakhir, upah yang diterima oleh nelayan berupa bagi hasil bersih. Hasil penjualan atau pendapatan dikurangi dengan modal ke laut yang ditangani oleh *pongawa*, kemudian dikurangi lagi 10% dimana 7% untuk *pongawa* dan 3% untuk nahkoda kapal, maka terdapatlah laba bersih. Laba bersih inilah yang dibagi antara pihak nelayan.

Faktanya melihat dari transaksi tersebut penetapan harga yang terjadi di pelelangan ikan Paoter di Kota Makassar belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena meskipun awalnya terjadi kerja sama antara dua belah pihak yaitu *pongawa* sebagai pemberi modal dan nelayan sebagai pengelola tetapi dalam hal penetapan harga hanya satu pihak saja yang boleh menentukannya yaitu pihak *pongawa* saja, nelayan tidak dapat menentukan harga dari hasil tangkapannya, karena dalam hal ini nelayan hanya berkontribusi di bidang tenaga atau sekedar jasa saja dan untuk pembagian upah tidak terdapat unsur bagi hasil yang

sama, karena dalam pembagian hasil ini *pongawa* sudah menetapkan hasil yang di dapatkannya sebanyak 10%, jadi untung dan rugi tidak dirasakan bersama dan hanya di rasakan oleh nelayannya saja.

Pembagian keuntungan dan kerugian harus di tanggung bersama dan tidak semestinya pihak pemberi modal menetapkan keuntungan pastinya karena hal tersebut mengakibatkan ada pihak yang merasa dizalimi meskipun masyarakat Nelayan mengetahui hal tersebut sangatlah tidak adil bagi mereka akan tetapi mau tidak mau nelayan harus menerima ketentuan yang di berikan oleh pemilik modal demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keadilan penetapan harga jual beli hasil perikanan di Pelelangan Ikan Paotere Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Seperti halnya penentuan harga yang ditetapkan oleh sepihak saja yaitu Ponggawa karena banyak berkontribusi dalam hal permodalan setiap kali nelayan berlayar mencari ikan.

Salah satu aktivitas penting dalam kehidupan ekonomi adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa, dimana dari aktivitas tersebut akan membentuk sebuah harga. Dalam konsep ekonomi syariah, tujuan diadakannya transaksi jual beli adalah untuk mencari rahmat Allah SWT, bukan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Asumsi dasar dalam ekonomi syariah adalah penjual dan pembeli mempunyai niat saling tolong menolong, saling memudahkan dan meringankan antara kedua belah pihak, serta penjual dan pembeli harus berusaha untuk saling jujur. Mekanisme penentuan harga juga ditentukan dengan cara pemufakatan dari kedua belah pihak. Dan jika dilihat dari sisi realita maka mekanisme penentuan harga yang adil terhadap hasil perikanan di Pelelangan ikan Paotere kota makassar dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam.

**B. *Saran***

1. Bagi pemerintah agar sekiranya bisa melihat langsung bagaimana mekanisme penetapan harga yang tercipta di pelelangan ikan dan dapat berkontribusi dalam penentuan harga.
2. Bagi Ponggawa untuk tidak sepihak menentukan harga dan memberikan kebebasan kepada nelayan dalam menentukan harga hasil tangkapannya.





## KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Zaenal Abidin. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Bulan Bintang: Jakarta.1986.
- Arfida B. R. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia Jakarta.2003.
- Abbas, Anwar. *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*,Fakultas Syariah Dan Hukum, Jakarta. 2009.
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Terjemahan Dewi Nurjulianti, dkk. Yayasan Swarna Bhumi. Jakarta, 1982
- Bakry, Nazar. *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1994
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Adi Grafika: Semarang. 1994
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. 2002
- Effendi, Irzal dan Wawan Oktriza. *Manajemen Agribisnis Perikanan*. Penebar Swadaya: Depok. 2006
- Fauzi A. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan Isu, Sintesis, dan Gagasan*. Gramedia: Jakarta. 2005
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama: Jakarta. 2000.
- Kusnadi. *Nelayan Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Humaniora Pers: Bandung. 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-empat, Jakarta 2013.
- Kuncoro, Haryo. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 1, hal. 45-56. 2002.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- Lexy J , Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarta.
- Radiosunu. *Konsep, Sistem, dan Fungsi Manajemen Pemasaran*. FE UGM: Yogyakarta. 1982
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2003.

Schumacher, E.F. *Kecil itu Indah: Ilmu Ekonomi yang Mementingkan Rakyat Kecil*. Terjemahan S. Supomo. LP3ES: Jakarta. 1987

S. Mulyadi. *Ekonomi kelautan*. Grafindo Persada: Jakarta. 2005

Satria, Arif. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Pustaka Cisendo: Jakarta. 2002

Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2003.

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta: Jakarta. 2014.

Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)* Cet. II. Diponegoro: Bandung. 1992.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



St. Marfuah Siddik, Yang akrab disapa Fuah. Lahir di Sungguminasa, 09 Januari 1995. Yang merupakan anak ketiga dari pasangan H. Marjuanda siddik, SE dan Hj. Nur Asia, S.Ag. Sampai saat ini, telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDI Bonto-Bontoa Sungguminasa pada tahun 2000 – 2006, kemudian melanjutkan kejenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ummul Mukminin Boarding School pada tahun 2006 – 2009, kemudian kejenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni di MAN 2 Model Makassar pada tahun 2009 – 2012, dan langsung melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yakni di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2012 dengan mengambil jurusan Ekonomi Islam yang kemudian menjadi alumni UIN Alauddin Makassar di tahun 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Nomor : EB.I/PP.00.9/35/2/2016  
Lamp : -  
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata, 13 September 2016

Kepada,

**Yth. Kepala UPT P2T BKPM  
Prov. Sulawesi Selatan**

Di –  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **St. Marfuah Siddik**  
NIM : 10200112081  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Semester : IX(Sembilan)  
Alamat : Jl. Sirajuddin Rani No. 316

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya **“Konsep Keadilan Penetapan Harga Jual-Beli Dalam Perspektif Islam”**

Dengan dosen pembimbing : **1. Dr. Rahmawati Muin, M. Ag.**

**2. Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag.**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Pelelangan Ikan Paotere Kota Makassar.**

Demikian harapan kami dan terima kasih.



**Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag**

NIP : 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan





1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 1 3 2 0 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
( UPT - P2T )

Nomor : 12851/S.01P/P2T/09/2016

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Walikota Makassar

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : EB.I/PP.00.9/3512/2016 tanggal 19 September 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ST. MARFUAH SIDDIK**  
Nomor Pokok : 10200112081  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" KONSEP KEADILAN PENETAPAN HARGA JUAL-BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 September s/d 26 Oktober 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 20 September 2016

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
2. Peninggal.





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 23 September 2016

**K e p a d a**

**Yth. CAMAT UJUNG TANAH**  
**KOTA MAKASSAR**

**Di -**

**MAKASSAR**

Nomor : 070/4092-II/BKBP/IX/2016  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12851/S.01.P/P2T/09/2016, Tanggal 20 September 2016, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **ST. MARFUAH SIDDIK**  
NIM/Jurusan : 10200112801/ Ekonomi Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN ALauddin  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.63, Makassar  
Judul : **"KONSEP KEADILAN PENETAPAN HARGA JUAL-BELI  
DALAM PESPEKTIF ISLAM"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **26 september s/d 26 Oktober 2016**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

**Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.**

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 196705242006041004



**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN UJUNG TANAH  
KELURAHAN GUSUNG**

Alamat : Jl. Barukang No.127 Makassar Kode Pos 90163

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

**Nomor : 070/022/KGS/X/2016.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a : Drs. BASO KADIR**  
**Jabatan : Lurah Gusung Kecamatan Ujung Tanah**  
**Kota Makassar**

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a : ST. MARFUAH SIDDIK**  
**Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi (s1 ) UIN Alauddin**  
**A l a m a t : Jl. Sultan Alauddin No. 63**  
**J u d u l : KONSEP KEADILAN PENETAPAN HARGA JUAL -**  
**BELI DALAM PESPEKTIF ISLAM**

Benar telah mengadakan penelitian di Kelurahan Gusung yang berkaitan dengan judul tersebut diatas **dari tanggal 26 September s/d 26 Oktober 2016**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Makassar, 26 Oktober 2016



**Drs. BASO KADIR**

Pangkat : Penata Tk I

Nip 195912141991031004



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan. Alauddin No. 63, Tlp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923, Makassar 90221  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp (0411) 841879 Fax (0411)8221400

**LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL**

Nomor: /EI/2016

**Konsep Keadilan Penetapan Harga Jual beli Hasil Perikanan Dalam Prespektif  
Islam (Studi Kasus Pelelangan Ikan Paotere Kota Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh :

Makassar, 28 September 2016

Penyusun

**St. Marfuah Siddik**  
**NIM: 10200112081**

Pembimbing I

**Dr. Rahmawati Muin, M.Ag**  
**NIP. 19760701 200212 2 001**

Pembimbing II

**Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag**  
**NIP. 19581231 199203 1 017**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

**Dr. Rahmawati Muin, M.Ag**  
**NIP. 19760701 200212 2 001**

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag**  
**NIP. 19581022 198703 1 002**




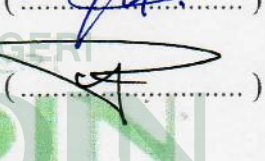

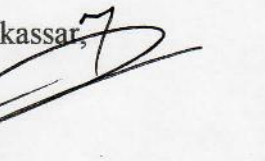


## PENGESAHAN SKRIPSI

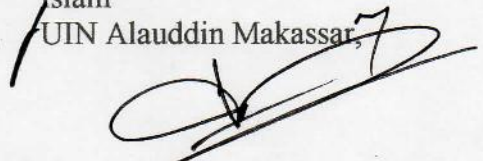
Skripsi yang berjudul **“Konsep Keadilan Penetapan Harga Jual Beli Hasil Perikanan Dalam Prespektif Islam (Studi kasus Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar)”**, yang disusun oleh St. Marfuah Siddik, NIM: 10200112081, mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2016 M, bertepatan dengan 9 Rabi’ul-Awwal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Desember 2016 M  
14 Rabi’ul-Awwal 1438 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag	(  )
Sekretaris	: Dr. Syaharuddin., M.Si	(  )
Munaqisy I	: Prof. Dr. Muslimin., M.Ag	(  )
Munaqisy II	: Hasbiullah., SE, M.Si	(  )
Pembimbing I	: Dr. Rahmawati Muin., M.Ag	(  )
Pembimbing II	: Drs. Urbanus Uma Leu., M.Ag	(  )

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Islam  
UIN Alauddin Makassar,

  
Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag  
NIP : 19581022 198703 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II : Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Hal : *Permohonan Judul Skripsi*

Kepada Yth.  
**Ketua Jurusan Ekonomi Islam**  
**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**  
**UIN Alauddin Makassar**  
Di-  
Gowa

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : St. Marfuah Siddik  
NIM : 10200112081  
Semester : VI  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

*19/12-2015*  
*Gunakan 20 judul*  
*No. 1, 2, dan 4. 1/ di*  
*tetaplah judul penelitian*

Dengan Ini Mengajukan Permohonan Judul Skripsi Sebagai Berikut :

1. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENINGKATAN OMSET UMKM  
(Studi kasus Dinas Koperasi kab.Gowa)
2. PENGARUH KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TAGIHAN AIR TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( Studi kasus PDAM Kota Makassar).
3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN BERBELANJA DI MINI MARKET DI BANDING BERBELANJA DI WARUNG KECIL (Studi Kasus Alfa midi dan warung kecil ).
4. KONSEP KEADILAN PENETAPAN HARGA TERHADAP NELAYAN DAN JURAGAN IKAN  
(Studi kasus Pasar Ikan Lelong).
5. PENGARUH MARKETING SYARIAH TERHADAP MINAT NASABAH DANA TALANGAN HAJI (Studi kasus Bank Mandiri Syariah KCP Panakukang).

Demikianlah Permohonan Saya Ajukan, Atas Perhatian dan Persetujuan Bapak/Ibu Saya  
Ucapkan Terima Kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

**Mengetahui,**  
**Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam,**

Gowa, 29 Desember 2015

**Pemohon,**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
UIN Alauddin Makassar

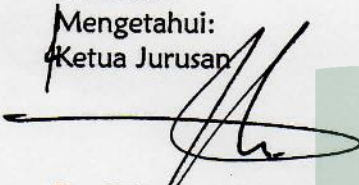
Assalamu Alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar :


Nama : St. Marfuah Siddik  
NIM : 10200112081  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Konsep Penetapan harga hasil Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam  
(Studi kasus Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar)

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Mengetahui:  
Ketua Jurusan

  
Dr. Rahmawati Muin, S.Ag.,M.Ag  
Nip.19760701200212 2 001

Yang bermohon

  
St. Marfuah Siddik  
10200112081

Disposisi:

Seminar Hasil tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tim Seminar Hasil :
  - Ketua : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
  - Sekretaris :
  - Pembimbing I : Dr.Rahmawati Muin, S.Ag.,M.Ag
  - Pembimbing II : Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag
  - Penguji I :
  - Penguji II :
  - Penguji III : M A K A S S A R
  - Pelaksana :
2. Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Hari/Tanggal/Jam :

Gowa,  
An/Dekan,  
Kasubag Akademik

2016



Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar :

Nama : St. Marfuah Siddik  
NIM : 10200112081  
Semester : VIII  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Konsep Keadilan Penetapan Harga Jual-Beli Hasil Perikanan dalam Prespektif Islam (Studi Kasus Pelelangan Ikan Paotere Kota Makassar).

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam


Mengetahui:

Ketua Jurusan

  
Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760701200212 2 001

Yang bermohon


  
St. Marfuah Siddik

Disposisi:

Ujian proposal dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tim Ujian Proposal :
  - Ketua : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
  - Sekretaris : ALAUDDIN
  - Pembimbing I : Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag
  - Pembimbing II : Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag
  - Pelaksana : M A K A S S A R
2. Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Hari/Tanggal/jam :

Samata, Agustus 2016  
Dekan,

  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
NIP. 19581022 19870002



UIN ALAUDDIN  
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax. 864923

Kampus II Jl. Sulatan Alauddin No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax. 424836

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara **St. Marfuah Siddik**, NIM : 10200112081, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal yang bersangkutan dengan judul, **“Konsep Keadilan Penetapan Harga Jual-Beli Hasil Perikanan dalam Prespektif Islam (Studi Kasus Pelelangan Ikan Paotere Kota Makassar)”**.

memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Samata, Augustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19760701 200212 2 001

**Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag**  
NIP. 19581231 199203 1 017





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1136 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif **St. Marfuah Siddik** : , NIM: 10200112081
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Ketua</b>                                  | : Dr. H. Abdul Wahab, SE.,M.Si  |
| <b>Sekretaris</b>                             | : Drs. H. M. Ridwan.,M.Si       |
| <b>Penguji Dirasah Islamiyah</b>              | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. |
| <b>Penguji Dasar Ekonomi Syariah</b>          | : Drs. Abd. Rasyid E., M.H.p    |
| <b>Penguji Keuangan dan Perbankan Syariah</b> | : Dr. Amruddin K., M.El.        |
| <b>Pelaksana</b>                              | : Rusmawandi Rara               |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.  
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.  
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**M A K A S S A R**

**Ditetapkan di** : Samata-Gowa  
**Pada tanggal** : 05 Oktober 2016  
**Dekan**



**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**  
**NIP. 19581022 198703 1 002**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 420 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **ST. Marfuah Siddik**, Nim: **10200112081** tertanggal **07 Maret 2016** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Konsep Keadilan Penetapan Harga Jual-Beli Hasil Perikanan Nelayanan dan Juragan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Peotere Kota Makassar**"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas  
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 Jo tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
- MEMUTUSKAN**
- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :  
1. **Rahmawati Mulin, S.Ag., M.Ag**, Sebagai Pembimbing Pertama.  
2. **Drs. Urbanus Umaleu., M.Ag**, Sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 11 Maret 2016



Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag  
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1440 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.St. Marfuah Siddik, NIM : 10200112081  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Nama : St. Marfuah Siddik, NIM : 10200112081, tertanggal 25 November 2016** untuk melaksanakan seminar hasil .
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**  
**Sekretaris : Dr. Syaharuddin, M.Si.**  
**Pembimbing I : Dr. Rahmawati Muin, M.Ag.**  
**Pembimbing II : Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag.**  
**Penguji I : Prof. Dr. H. Muslimin.,M.Ag**  
**Penguji II : Hasbiullah, SE., M.Si.**  
**Pelaksana : Nurmiah Muin, S.IP., MM.**
- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 25 November 2016

Dekan,

**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**  
**NIP. 19581022 198703 1 002**





Nomor : **4531** /EB.1/PP.00.9/2016

Sifat : Penting

Lamp :-

Hal : **Undangan Seminar Hasil**

Samata, / Desember 2016

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di-  
Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : St. Marfuah Siddik  
NIM : 10200112081  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Konsep Penetapan Harga Hasil Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pelangan Ikan Poeter di Kota Makassar)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 05 Desember 2016

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Dekan,

Kuasa nomor : 4471/EB.1/Kp.07.6/2016

Tertanggal : 29 November 2016

  
Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.

NIP. 19710402 200003 1 002

Nomor : EB.I/PP.00.9/1400 /2016  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Seminar Proposal  
A.n. St. Marfuah Siddik/10200112081

Samata, 08 September 2016

Kepada Yth:

1. **Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.** Sebagai Pembimbing I
2. **Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag.** Sebagai Pembimbing II

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengundang bapak, untuk menghadiri seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 19 September 2016
Waktu	: 09.00 - Selesai
Judul Skripsi	: Konsep Keadilan Penetapan Harga Jual Beli Hasil Perikanan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pelelengan Ikan Paotere Kota Makassar)
Tempat	: Ruang Dekan

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,  
Dekan

  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : *455*/EB.1/PP.00.9/2016

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah**

Samata, 8 Desember 2016

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing

Di-

Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : St. Marfuah Siddik

NIM : 10200112081

Jurusan : EKONOMI ISLAM

Judul Skripsi : "Konsep Penetapan Harga Hasil Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pelanggan Ikan Poeter di Kota Makassar)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 09 Desember 2016

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : Ruang Dekan

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,



Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag

NIP. 19581022 198703 1 002